

KLASTER: PENELITIAN PENGEMBANGAN
PRODI SARJANA

LAPORAN PENELITIAN AKHIR

Implementasi Kurikulum Merdeka dalam PAK di Sekolah Penggerak
pada Jenjang SD, SMP, dan SMA/K di Kota Pontianak



Oleh:

Gustaf Hariyanto, M.Si.
Lukas Ahen, S.Ag., M.M.Pd.
Semi

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI
PONTIANAK
2025

KLASTER: PENELITIAN PENGEMBANGAN
PRODI SARJANA

LAPORAN PENELITIAN AKHIR

Implementasi Kurikulum Merdeka dalam PAK di Sekolah Penggerak
pada Jenjang SD, SMP, dan SMA/K di Kota Pontianak



Oleh:

Gustaf Hariyanto, M.Si.
Lukas Ahen, S.Ag., M.M.Pd.
Semi

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI
PONTIANAK
2025

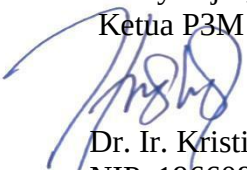
LEMBARAN PENGESAHAN

1. Judul : Implementasi Kurikulum Merdeka dalam PAK di Sekolah Penggerak pada Jenjang SD, SMP, dan SMA/K di Kota Pontianak
2. Tema : Pendidikan Karakter dalam Perspektif Katolik
3. Sub-tema : Integrasi Nilai-nilai Kekatolikan dalam Kurikulum Sekolah
4. Ketua Peneliti : Gustaf Hariyanto, S.T., S.S., M.Si.
 - a. Nama : Gustaf Hariyanto
 - b. NIP/NIDN : 197310252023211002/2725107301
 - c. Jafung : Asisten Ahli
 - d. Bidang Keilmuan : Filsafat, Logika, dan Sosiologi
 - e. HP : 081352030087
 - f. Email : gustafharyanto@stakatnpontianak.ac.id
 - g. Jumlah Anggaran : Rp. 15.000.000,-
 - h. Jangka Waktu : Enam bulan

5. Anggota Peneliti:

No	Nama	NIDN/NIM	Jabatan
1	Lukas Ahen, S.Ag., M.M.Pd.	2617056601	Lektor
2	Semi	23101188	Mahasiswi

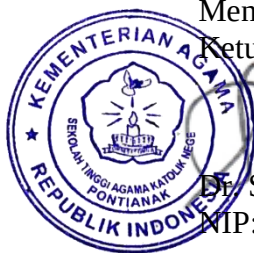
Menyetujui,
Ketua P3M

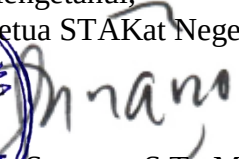

Dr. Ir. Kristianus, M.Si.
NIP. 196608282023211001

Kubu Raya, 4 November 2025
Ketua Peneliti


Gustaf Hariyanto, M.Si.
NIP. 197310252023211002

Mengetahui,
Ketua STAKat Negeri Pontianak




Dr. Sunarso, S.T., M.Eng.
NIP: 197511171999031001

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menyingkap bagaimana pengimplementasian Kurikulum Merdeka dalam PAK pada sejumlah Sekolah Penggerak – pada jenjang SD, SMP, dan SMA/K – di Kota Pontianak berlangsung. Selain itu juga untuk menyingkap peluang dan tantangan bagi para guru PAK di Sekolah Penggerak untuk menjadi Guru Penggerak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi dari berbagai pemangku kepentingan, seperti kepala sekolah, guru, dan BIMAS Katolik Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka (KM) di Sekolah Penggerak (SP) telah memberikan tantangan dan peluang tersendiri, seperti peningkatan kompetensi guru dan penyesuaian kurikulum yang lebih fleksibel. Meskipun demikian, terdapat kendala terkait pemahaman konsep, kesiapan sumber daya, dan dukungan lingkungan sekolah. Temuan ini memberikan gambaran penting tentang strategi dan langkah yang perlu diperbaiki agar implementasi Kurikulum Merdeka dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif terhadap mutu pembelajaran di Sekolah Penggerak (SP) yang telah dicabut dari KM. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan dan pendampingan kepada guru serta penguatan kolaborasi antar sekolah sebagai langkah strategis ke depan.

Kata kunci: Kurikulum Merdeka (KM), Sekolah Penggerak (SP), metode, strategi, guru PAK

Kata Pengantar

Laporan penelitian akhir yang berjudul “Implementasi Kurikulum Merdeka dalam PAK di Sekolah Penggerak pada Jenjang SD, SMP, dan SMA/K di Kota Pontianak” ini merupakan salah satu kajian yang telah dilaksanakan oleh para dosen dan mahasiswa yang tergabung dalam Tim Peneliti untuk periode 2025. Penelitian ini berfokus seputar Kurikulum Merdeka (KM), Sekolah Penggerak (SP), dan Guru Penggerak (GP). Secara garis besar, laporan penelitian akhir ini dibagi dalam sejumlah bagian, yakni Pendahuluan, Kajian Pustaka, Metodologi, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Penutup Daftar Pustaka, Lampiran, Foto-foto Lapangan, dan Riwayat Hidup. Pada bagian awal, yakni Latar Belakang Masalah, pokok bahasan masih berkisar seputar gambaran umum keseluruhan penelitian. Gambaran umum tersebut meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kegunaan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, dan metode penelitian.

Terakhir, bukan berarti tak penting, Tim Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak yang telah memberi kesempatan sehingga bisa berpartisipasi dan menyelesaikan laporan penelitian akhir ini. Tim juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkenan memberikan masukan-masukan untuk penyelesaian laporan penelitian akhir ini – meskipun namanya tak disebutkan satu persatu – sehingga laporan penelitian akhir 2025 ini dapat terselesaikan.

Kubu Raya, 4 November 2025

Ketua Tim Peneliti



Gustaf Hariyanto, S.T., S.S., M.Si.
NIP. 197310252023211002

Daftar Isi

Abstrak.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Signifikansi Masalah	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
BAB III METODOLOGI	9
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	9
B. Metode Penelitian	9
C. Teknik Pengumpulan Data	10
D. Teknik Analisis Data	10
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	11
A. Profil Sekolah Penggerak di Kota Pontianak	11
B. Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran PAK	12
C. Pengaruh Implementasi terhadap Kompetensi Peserta Didik.....	14
D. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi.....	15
E. Upaya dan Solusi yang Diterapkan oleh Sekolah.....	16
BAB V PENUTUP	20
A. Kesimpulan.....	20
B. Saran dan Rekomendasi.....	21
Daftar Pustaka.....	24
Lampiran.....	25
Foto-foto Lapangan	27
Riwayat Hidup Penulis	29
Laporan Keuangan.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fasilitas dan infrastruktur berperan penting dalam keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak, terutama dalam hal ketersediaan perangkat IT. Sekolah Penggerak berkesempatan memperoleh bantuan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran selama program berlangsung. Kemendikbud telah menyediakan buku-buku yang sesuai dengan Kurikulum Merdeka, sementara guru bertugas untuk mengembangkannya lebih lanjut. Dalam praktiknya, berbagai platform pembelajaran digunakan sebagai media pendukung, seiring dengan peran Sekolah Penggerak sebagai pelopor digitalisasi sekolah (Patilima dalam Rahayu et al., 2022).

Salah satu faktor utama dalam keberhasilan Sekolah Penggerak adalah peran kepala sekolah yang memiliki semangat juang tinggi dalam mengembangkan sekolah. Kepala sekolah harus mampu membimbing, mengarahkan, dan menginspirasi seluruh elemen sekolah agar bersama-sama bergerak menuju pendidikan yang lebih berkualitas serta menghasilkan lulusan yang kompeten. Sekolah Penggerak tidak selalu identik dengan sekolah besar yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, melainkan sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah yang telah mengikuti pelatihan khusus Sekolah Penggerak dan berkomitmen untuk membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Di bawah kepemimpinan kepala sekolah yang visioner, sekolah dengan fasilitas terbatas tetap dapat berkembang dan berperan sebagai agen perubahan. Bahkan sekolah kecil dengan keterbatasan lahan dan minimnya fasilitas seperti perpustakaan pun dapat menjadi pilihan utama bagi orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Dalam rangka memastikan kelancaran proses pembelajaran, supervisi, diskusi, dan pendampingan dilakukan secara berkala. Selain itu, kepala sekolah juga dituntut untuk berinovasi dalam administrasi sekolah, misalnya dengan menerapkan konsep *paperless* guna mengurangi penggunaan kertas. Untuk mendukung hal tersebut, kepala sekolah dapat menyediakan *dashboard digital* sebagai media penyimpanan administrasi sekolah. Mengajak guru untuk beradaptasi dengan perubahan, terutama guru senior, bukanlah hal yang mudah.

Oleh karena itu, kepala sekolah harus memiliki strategi efektif agar seluruh tenaga pendidik dapat terlibat aktif dalam transformasi pendidikan.

Selain kepala sekolah, peran guru di Sekolah Penggerak juga menjadi faktor krusial dalam keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka. Guru harus berperan sebagai tutor, fasilitator, dan sumber inspirasi bagi peserta didik, sehingga mampu mendorong mereka untuk menjadi siswa yang aktif, kreatif, dan inovatif (Mulyasa, 2021). Kebijakan Merdeka Belajar menekankan peran guru sebagai pendidik yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman serta membangun motivasi siswa, sehingga mereka tidak merasa terbebani oleh materi yang disampaikan (Yusuf & Afriansyah, 2021). Konsep Merdeka Belajar bertujuan mengembalikan sistem pendidikan nasional kepada prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang dengan memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menafsirkan kompetensi dasar kurikulum sesuai dengan penilaian mereka (Sherley & Sihombing, 2020). Agar tujuan tersebut tercapai, guru harus memiliki keterampilan dalam menyusun materi ajar dengan cara yang menyenangkan serta memanfaatkan teknologi sebagai sumber belajar. Di Sekolah Penggerak, guru mendapatkan bimbingan dari kepala sekolah dan rekan sejawat untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Bahkan, guru yang mendekati masa purna bakti tetap didorong untuk belajar dan meningkatkan kinerjanya, sementara staf sekolah, termasuk penjaga sekolah, juga dilatih dalam pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu tantangan bagi guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak adalah menyisihkan waktu untuk merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menantang setiap hari. Oleh karena itu, keterlibatan guru dalam pengembangan kurikulum menjadi hal yang penting agar isi kurikulum dapat selaras dengan kebutuhan siswa di dalam kelas (Alsubaie, 2016). Tantangan lain yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah mengubah pola pikir guru agar mau keluar dari zona nyaman. Upaya perubahan yang dilakukan oleh kepala sekolah tidak akan berhasil jika guru enggan beradaptasi. Selain itu, guru di Sekolah Penggerak juga perlu memiliki kemampuan untuk mendorong dan menginspirasi rekan sejawatnya agar tujuan bersama dapat tercapai.

Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak berpedoman pada profil pelajar Pancasila, dengan tujuan mencetak lulusan yang kompeten serta memiliki karakter kuat. Struktur Kurikulum Merdeka mencakup kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan kegiatan ekstrakurikuler. Sesuai dengan

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 162 Tahun 2021, kerangka dasar kurikulum terdiri dari: 1) Struktur kurikulum; 2) Capaian pembelajaran; 3) Prinsip pembelajaran dan asesmen. Dalam Kurikulum Merdeka, setiap kegiatan diharapkan menghasilkan proyek. Sekolah dapat menyelenggarakan pameran untuk menampilkan karya siswa, meskipun memiliki keterbatasan ruang, dengan melibatkan orang tua serta dukungan dari dinas terkait. Struktur Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak dibagi menjadi tiga fase berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 162 Tahun 2021: Fase A: Kelas I dan II, berfokus pada pengembangan dan penguatan literasi serta numerasi dasar. Pada fase ini, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) belum diwajibkan. Fase B: Kelas III dan IV, di mana mata pelajaran IPAS mulai diajarkan untuk membangun pemahaman dasar dalam ilmu pengetahuan alam dan sosial. Fase C: Kelas V dan VI, dengan pendekatan pembelajaran yang dapat dilakukan melalui mata pelajaran terpisah atau pendekatan tematik yang tetap berorientasi pada pembentukan karakter profil pelajar Pancasila (Rahayu et al., 2022).

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia adalah melalui Program Guru Penggerak. Program ini berfokus pada nilai-nilai Pancasila untuk membantu para guru agar berkembang sehingga mereka dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam proses pembelajaran sesuai dengan bidang studi masing-masing. Guru Penggerak berperan sebagai katalisator perubahan dalam dunia pendidikan, mendorong paradigma yang berorientasi pada pembelajaran aktif serta menciptakan metode pengajaran yang unggul. Tujuan utama dari penerapan Kurikulum Merdeka adalah memastikan guru dapat mencapai hasil pembelajaran terbaik. Kurikulum ini menuntut guru untuk beradaptasi, meningkatkan kompetensi akademik, mengembangkan kreativitas, serta memanfaatkan metode dan media pembelajaran yang inovatif. Program Guru Penggerak dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mengoptimalkan implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia. Payung hukum dari program ini tertuang dalam Permendikbud Ristek No. 26 Tahun 2022, yang menetapkan Guru Penggerak sebagai pendidik yang berpusat pada siswa dan terus berinovasi dalam mengajar sesuai dengan kemampuan peserta didik. Regulasi ini menjadi dasar dalam pengembangan program yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia (Kurniasih, 2023b, 2023a; Widyastuti, 2022).

Penentuan sekolah untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka didasarkan pada kesiapan sekolah tersebut dalam melewati sejumlah seleksi serta kriteria yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud. Di sisi lain, meskipun sekolah tersebut sudah ditetapkan sebagai Sekolah Penggerak, ini tidak berarti bahwa secara otomatis para gurunya menjadi Guru Penggerak. Para guru harus melewati sejumlah tahapan seleksi penentuan Guru Penggerak yang berlandaskan pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh Kemendikbud. Oleh karena itu, meskipun sebuah sekolah sudah ditetapkan sebagai Sekolah Penggerak, hal itu tidak berarti bahwa para gurunya – guru tertentu, terutama guru bidang studi – otomatis menjadi Guru Penggerak. Demikian, misalnya, yang terjadi pada guru PAK. Situasi dan kondisi di sekolah tempat mereka – guru PAK – mengajar terkait jumlah siswa yang diajar dalam satu kelas tidak memenuhi persyaratan bagi mereka untuk menjadi Guru Penggerak. Umumnya di sekolah-sekolah negeri di Kota Pontianak jumlah siswa yang beragama Katolik dalam satu kelas tidak cukup memadai bagi guru PAK untuk bisa mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Syarat minimum jumlah siswa dalam satu kelas menjadi kendala – selain batas usia – untuk menjadikan guru PAK yang mengajar di persekolahan negeri menjadi seorang Guru Penggerak. Namun, terkait persyaratan jumlah minimum siswa dalam satu kelas ini justru memberi peluang besar bagi para guru PAK yang mengajar di persekolahan swasta Katolik menjadi seorang Guru Penggerak. Dalam beberapa kasus sebagai informasi awal diketahui bahwa pada jenjang SD – di Kota Pontianak – sedikit sekali guru yang sudah ditetapkan sebagai Guru Penggerak untuk bidang studi PAK. Pada jenjang sekolah menengah pertama juga masih segelintir orang yang sudah ditetapkan sebagai guru penggerak untuk mata pelajaran PAK. Demikian pula halnya pada jenjang SMA/SMK juga sedikit sekali orang yang berpredikat sebagai Guru Penggerak. Peluang para guru PAK di Kota Pontianak untuk menjadi seorang Guru Penggerak umumnya harus melampaui dua persyaratan yang harus terpenuhi: jumlah minimum siswa dalam satu kelas dan usia gurunya. Selain itu, harus ada kemauan dari guru untuk berubah dan mengikuti perkembangan zaman – termasuk perubahan kurikulum – adalah salah satu aspek yang memengaruhi motivasi seseorang untuk menjadi Guru Penggerak.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana berkaitan dengan pengimplementasian Kurikulum Merdeka dalam PAK pada sejumlah Sekolah Penggerak untuk sejumlah jenjang di Kota Pontianak. Masalah ini dapat dibagi lagi menjadi dua bagian:

- (1) Bagaimana Sekolah Penggerak di Kota Pontianak pada berbagai jenjang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dalam PAK?
- (2) Bagaimana peluang dan tantangan guru PAK untuk menjadi Guru Penggerak di persekolahan yang berpredikat Sekolah Penggerak?

C. Pembatasan Masalah

Merujuk kepada masalah penelitian, paling tidak ada dua tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Untuk menyingkap bagaimana pengimplementasian Kurikulum Merdeka dalam PAK pada sejumlah Sekolah Penggerak – pada jenjang SD, SMP, dan SMA/K – di Kota Pontianak berlangsung;
- (2) Untuk menyingkap peluang dan tantangan bagi para guru PAK di Sekolah Penggerak untuk menjadi Guru Penggerak.

D. Signifikansi Masalah

Manfaat dari penelitian ini adalah tersingkapnya pengimplementasian Kurikulum Merdeka – dengan sejumlah tantangannya – pada PAK di sekolah yang berpredikat Sekolah Penggerak pada jenjang SD, SMP, dan SMA/K.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Di Indonesia, perubahan kurikulum telah berlangsung sejak tahun 1947, kemudian disusul oleh kurikulum tahun 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, dan revisi kurikulum 1994 pada tahun 1997. Selanjutnya, pada tahun 2004 diperkenalkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), yang kemudian digantikan oleh Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006. Pada tahun 2013, lahir Kurikulum 2013 (K-13 atau Kurtilas), yang direvisi pada tahun 2018 menjadi Kurtilas Revisi. Terbaru, muncul Kurikulum Merdeka sebagai inovasi dalam sistem pendidikan di Indonesia (Kurniasih, 2023a, 2023b; Widyastuti, 2022). Kurikulum ini dirancang sebagai model pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dengan nyaman, santai, dan menyenangkan, tanpa tekanan atau stres, sehingga mereka dapat mengekspresikan bakat alaminya. Merdeka Belajar menekankan kebebasan dalam berpikir serta kreativitas. Salah satu inisiatif yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam program Merdeka Belajar adalah Sekolah Penggerak. Program ini bertujuan untuk mendukung sekolah dalam membentuk generasi pembelajar sepanjang hayat yang memiliki karakter sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran guru. Sebagai aktor utama dalam pendidikan, guru diharapkan dapat menjadi penggerak perubahan dengan menerapkan berbagai tindakan positif yang berdampak langsung pada perkembangan peserta didik (Ainia dalam Rahayu et al., 2022). Kurikulum Merdeka adalah upaya penataan kembali sistem pendidikan nasional guna mempersiapkan perubahan dan kemajuan bangsa agar selaras dengan perkembangan zaman (Yamin & Syahrir dalam Rahayu et al., 2022).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, bahwa reformasi pendidikan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan administratif, tetapi juga memerlukan transformasi budaya (Satriawan et al., dalam Rahayu et al., 2022). Pernyataan ini selaras dengan pandangan bahwa konsep Merdeka Belajar dapat diterima, karena sejalan dengan visi dan misi pendidikan Indonesia ke depan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas serta mampu bersaing di berbagai aspek kehidupan (Sibagariang et al., dalam Rahayu et al., 2022). Kurikulum Merdeka

diharapkan mampu mengembangkan potensi dan kemampuan siswa secara optimal. Melalui kurikulum ini, siswa dapat memperoleh pembelajaran yang bersifat kritis, berkualitas, ekspresif, aplikatif, beragam, dan progresif. Selain itu, keberhasilan pelaksanaannya memerlukan kolaborasi, komitmen yang kuat, keseriusan, serta implementasi nyata dari seluruh pihak agar Profil Pelajar Pancasila dapat tertanam dalam diri peserta didik (Fetra Bonita Sari, Risda Amini dalam Rahayu et al., 2022).

Dalam lingkup nasional, kebijakan perubahan kurikulum ini dapat dipahami sebagai bagian dari politik pendidikan yang berhubungan dengan kepentingan berbagai pihak (Mulyasa, 2014). Namun, dalam praktiknya, kurikulum ini sering kali dipolitisasi untuk kepentingan kekuasaan. Sebagai pelaksana utama pendidikan, sekolah—termasuk pengawas, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik—akan merasakan dampak langsung dari setiap perubahan kurikulum. Selain itu, orang tua, masyarakat luas, dunia usaha dan industri, serta para birokrat, baik di tingkat pusat maupun daerah, juga akan terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal yang sama berlaku dalam pengembangan dan penataan Kurikulum Merdeka.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, kurikulum didefinisikan sebagai serangkaian rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, isi, materi ajar, serta metode yang digunakan. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan nasional (Munandar dalam Rahayu et al., 2022). Pendidikan merupakan faktor utama dalam menentukan kualitas sumber daya manusia serta kemajuan suatu bangsa. Melalui proses pendidikan, dapat lahir berbagai ide kreatif dan inovatif yang selaras dengan perkembangan zaman. Pengembangan kurikulum menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kebijakan pendidikan yang tepat akan tercermin dalam penerapan kurikulum yang dijalankan. Selain itu, kurikulum juga dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan yang berperan penting dalam keberlangsungan proses pembelajaran.

Merdeka Belajar menekankan kebebasan dalam proses pembelajaran bagi guru dan siswa. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, konsep ini bertujuan memberikan fleksibilitas serta kewenangan kepada setiap institusi pendidikan agar tidak terikat pada administrasi yang rumit. Inti dari Merdeka Belajar adalah memberikan kepercayaan kepada guru, sehingga mereka memiliki kebebasan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran (Koesoema, 2020). Dengan suasana belajar yang lebih

nyaman, guru dan siswa dapat berdiskusi dengan lebih santai. Pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas dengan metode ceramah, tetapi juga mendorong keberanian, kemandirian, kecerdikan dalam berinteraksi, kesopanan, serta pengembangan kompetensi. Selain itu, sistem ini tidak hanya berfokus pada peringkat akademik, yang menurut beberapa survei justru menimbulkan keresahan bagi anak dan orang tua. Konsep Merdeka Belajar bertujuan untuk mengembalikan sistem pendidikan nasional pada esensinya sesuai undang-undang, dengan memberikan kebebasan bagi sekolah dalam menafsirkan kompetensi dasar kurikulum menjadi sistem penilaian mereka sendiri. (Sherley & Sihombing, 2020). Untuk itu, penerapan Kurikulum Merdeka akan lebih relevan dan interaktif di mana pembelajaran berbasis proyek akan memberikan kesempatan luas kepada siswa untuk secara aktif menggali isu-isu yang faktual.

BAB III

METODOLOGI

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di sejumlah sekolah di Kota Pontianak yang pernah berstatus Sekolah Penggerak, baik sekolah negeri dan swasta dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, sedangkan dua sekolah menengah atas keduanya berstatus sekolah negeri di mana yang satu sekolah umum dan satunya lagi adalah sekolah vokasi: SD Negeri 24 Pontianak Timur, SD Gembala Baik I Kota Pontianak, SMP Negeri 10 Kota Pontianak, SMP Katolik Santu Petrus Kota Pontianak, SMA Negeri 8 Pontianak, dan SMK Negeri 8 Pontianak Utara. penelitian ini dimulai dari April hingga September 2025.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menyingkap fenomena implementasi Kurikulum Merdeka dalam PAK. Dalam pendekatan kualitatif, data terdiri dari informasi yang terbuka (*open-ended*) yang didapat melalui wawancara (*interview*) terhadap partisipan (Kepala Sekolah dan guru PAK), pengamatan partisipan, baik pengumpulan dokumen, pengumpulan audiovisual, atau *videotape*. Analisis data kualitatif – kata-kata atau teks atau gambar – menurut jalur agregat kata-kata atau gambar ke dalam kategori informasi dan menampilkan keragaman ide selama proses pengumpulan data (Creswell & Vicki L. Plano Clark, 2006). Pendekatan penelitian ini lebih pada penggambaran, pendeskripsian, dan penganalisisan subjek penelitian. Dalam hal ini, memahami lebih jauh peran kepala sekolah dan guru PAK sebagai aktor dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka Belajar.

Data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan kutipan-kutipan dokumen. Sumber data adalah Kepala Sekolah dan Guru PAK dari sekolah yang terkategori sebagai Sekolah Penggerak yang masing-masing mewakili sekolah swasta dan negeri: dua sekolah dari jenjang SD, dua sekolah dari jenjang SMP, dua sekolah dari jenjang SMA, dan dua sekolah dari jenjang SMK di Kota Pontianak – sebagai lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan teknik dokumenter. Alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara, dan dokumentasi. Teknik menguji

keabsahan data menggunakan triangulasi (menggunakan teknik yang beragam), sedangkan teknik analisis data menggunakan model interaktif (*interactive model*): reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini didapat melalui teknik wawancara mendalam yang terstruktur. Melalui wawancara peneliti menggali pengalaman, pandangan, dan keyakinan informan terkait Sekolah Penggerak. Selain wawancara, penelitian ini juga melakukan diskusi kelompok fokus (*Focus Group Discussion - FGD*) yang melibatkan kepala sekolah, guru Pendidikan Agama Katolik (PAK), dan Bimbingan Masyarakat Katolik Kota Pontianak. Diskusi kelompok fokus (*Focus Group Discussion*) ini bertujuan untuk menciptakan ruang bagi dialog dan interaksi yang lebih dinamis antara berbagai pihak yang terlibat. Dengan menghadirkan berbagai perspektif dalam satu forum, peneliti dapat menangkap keragaman pandangan dan pengalaman yang ada di antara kelompok yang berbeda. FGD ini tidak hanya memperkaya data atau informasi yang diperoleh, tetapi juga mendorong kolaborasi dan pemahaman yang lebih baik antara pihak-pihak yang terlibat. Diskusi ini dapat membuka peluang untuk menemukan kesamaan dan perbedaan, serta menjelaskan bagaimana masing-masing kelompok memandang proses sebagai Sekolah Penggerak. Selain wawancara dan FGD, digunakan pula studi dokumen berupa literatur yang terkait dengan Sekolah Penggerak.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan model interaktif (*interactive model*): reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Reduksi data berarti membuat transkrip dari hasil wawancara, dan menyusunnya / menyortir wawancara menjadi kalimat-kalimat yang berkaitan dengan isu penelitian. Hasil transkrip yang tidak relevan tidak dimasukkan dalam tulisan. Setelah dilakukan pentranskripsian wawancara, hasilnya disajikan sedemikian rupa secara logis-sistematis menurut kaidah-kaidah penulisan yang ditentukan. Dari situ kemudian dibuat kesimpulan berdasarkan penyajian data yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Sekolah Penggerak di Kota Pontianak

Berikut adalah profil singkat dari sejumlah sekolah yang berstatus Sekolah Penggerak (SP) di Kota Pontianak. *Pertama*, SDS Gembala Baik I. Jenjangnya adalah Sekolah Dasar (SD) yang berlokasi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Karakteristik sekolah ini mengusung misi pendidikan berbasis iman Katolik dan berfokus pada pengembangan akademik serta karakter siswa. Fasilitas dan kurikulum umumnya mengikuti Kurikulum Merdeka dengan penekanan pada pendidikan karakter dan kegiatan agama. *Kedua*, SMP Negeri 10. Sekolah ini berjenjang Sekolah Menengah Pertama yang berlokasi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Keberadaan sekolah ini merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, menawarkan pendidikan dasar menengah dengan Kurikulum Merdeka (beberapa informan menyebutnya), dan sekolah ini memiliki fasilitas lengkap dalam mendukung berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Fasilitas dan kurikulum mengikuti kurikulum Kemendikbud (Kurikulum Merdeka - KM), dengan pengembangan akademik dan kegiatan penguatan karakter siswa. Pada masa peralihan ini, yakni dari presiden Joko Widodo ke Prabowo muncul istilah Kurikulum Nasional. Terkait di masa transisi ini, ada kebingungan di kalangan guru, ada yang masih menyebutnya ke KM, ada pula yg menyebutnya Kurikulum Nasional (KN).

Ketiga, SMAN 8 Kota Pontianak. Sekolah ini berjenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 8, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. SMAN 8 Pontianak merupakan salah satu sekolah menengah atas unggulan di Kota Pontianak. Sekolah ini memiliki fasilitas lengkap dan program unggulan baik dari sisi akademik, seni, dan olahraga untuk mendukung pengembangan siswa secara holistik. Fokus Program sekolah ini adalah penguatan pendidikan umum dengan keunggulan di bidang studi tertentu, serta kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan karakter dan minat siswa.

Keempat, SMKN 8 Pontianak. Jenjang sekolah ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berlokasi di Kota Pontianak. SMKN 8 Pontianak menawarkan berbagai program kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja. Sekolah ini memiliki kerja sama dengan berbagai perusahaan dan industri untuk memberikan pengalaman praktis kepada siswa. Program Keahliannya mencakup bidang seperti teknologi, administrasi, teknik, dan bidang lainnya sesuai perkembangan kebutuhan industri di daerah. Sekolah biasanya menawarkan jurusan kejuruan sesuai kebutuhan industri, seperti otomotif, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dll. Sekolah ini berfokus mempersiapkan peserta didik dengan kompetensi kejuruan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

B. Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran PAK

Menurut P, seorang Pendamping Satuan Pendidikan (pengawas guru) PAK jenjang SD hingga SMA/SMK, penerapan Kurikulum Merdeka (KM) tetap berjalan meskipun mengalami berbagai tantangan. Seiring bergantinya menteri, ada persepsi “ganti menteri, ganti kurikulum.” Hal ini berimplikasi pada perubahan yang berorientasi proyek dan munculnya kompetisi tidak sehat antara Sekolah Penggerak (SP) dan sekolah lainnya. Selanjutnya, ia menuturkan bahwa keberadaan GP dan SP, misalnya, bisa memunculkan kecemburuan dan privilese bagi sekolah berlabel tersebut yang dapat mengabaikan keberadaan sekolah lain. Selain itu, guru-guru senior yang tidak melek atau gagap teknologi – termasuk guru PAK – banyak yang masih menggunakan metode konvensional, seperti menulis secara manual dengan tangan, dan belum semua dari mereka itu memahami maupun menginternalisasi Kurikulum Merdeka secara penuh.

Meskipun pemerintahan sudah berganti presiden, Kurikulum Merdeka tetap dilanjutkan dengan konsep pembelajaran mendalam (*deep learning*). Namun, bantuan dan dana yang sebelumnya diberikan untuk menjalankan program Sekolah Penggerak (SP) sudah dihentikan, dan terdapat wacana mengaktifkan kembali Kelompok Kerja Guru (KKG) dan MGMP. Secara umum, sekolah-sekolah seperti SMK St. Maria dan SMKN 8 Kota Pontianak telah melaksanakan berbagai inovasi terkait implementasi KM, termasuk pelatihan pendampingan calon Guru Penggerak

(GP) dan pendampingan sekolah. Pelatihan untuk GP dan guru mapel dilaksanakan tidaklah berbasis mata pelajaran tertentu, melainkan merujuk pada mapel umum untuk semua guru, dengan sasaran menghasilkan modul ajar dan memformulasikan tujuan pembelajaran sesuai KM. Pendampingan dilakukan secara daring dan kunjungan langsung (“pemain darat”), serta pelatihan secara berkelanjutan seperti loka karya, supervisi, dan kegiatan pengembangan profesional. Dana bantuan operasional turut mendukung kegiatan ini, meskipun terkadang kendala waktu dan sumber daya menjadi tantangan utama. Ada sejumlah tantangan utama dalam penerapan KM ini. *Pertama*, ketidaksiapan sebagian guru menghadapi perubahan paradigma (misal: dari K-13 ke KM). *Kedua*, waktu yang terbatas untuk menyesuaikan modul ajar dan pelaksanaan. *Ketiga*, perbedaan kondisi peserta didik, terutama di sekolah daerah dan siswa berkebutuhan khusus. *Keempat*, penggunaan modul dan perangkat ajar yang cenderung di-copy paste dan kurang sesuai konteks lokal. *Kelima*, pengaruh pergantian pemerintahan dan regulasi yang tidak konsisten, termasuk perubahan sebutan dan isi kurikulum.

Pengawas dan pendamping satuan pendidikan berinisiatif untuk melakukan supervisi dan pendampingan, baik secara langsung maupun daring, untuk memastikan implementasi KM berjalan sesuai kebijakan. Mereka juga mengedepankan kegiatan pengimbasan, pelatihan internal (IHT), serta penguatan kepercayaan diri guru melalui kegiatan berbagi pengalaman (kombi), dan pendampingan ke sekolah lain. Di berbagai sekolah seperti SDS Gembala Baik dan SMPN 10 Pontianak, implementasi KM dan program terkait seperti P5 masih berjalan secara bertahap dan menghadapi kendala yang serupa: jadwal yang padat, kesiapan perangkat pembelajaran, serta adaptasi terhadap inovasi pembelajaran seperti deep learning. Namun, sekolah tetap mengupayakan keberlanjutan pelaksanaan, termasuk mengikuti pelatihan, supervisi, dan fasilitasi dari dinas maupun lembaga terkait. Meskipun berbagai tantangan, implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat sekolah dasar dan menengah di kota Pontianak menunjukkan komitmen jangka panjang. Pendampingan pengawas dan satuan pendidikan perlu terus difokuskan pada peningkatan kompetensi guru, penyediaan perangkat yang relevan, dan memanfaatkan berbagai platform pelatihan serta supervisi.

C. Pengaruh Implementasi terhadap Kompetensi Peserta Didik

Implementasi Kurikulum Merdeka (KMB) yang terus berjalan di berbagai tingkat pendidikan, mulai dari SD hingga SMA/SMK, menunjukkan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kompetensi peserta didik. Melalui konsep pembelajaran mendalam (deep learning), peserta didik didorong untuk lebih aktif, kreatif, dan mampu mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Keleluasaan dalam memilih metode, waktu, dan tempat belajar memungkinkan peserta didik mengekspresikan kreativitas dan spiritualitasnya, seperti dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5) dan berbagai kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang memperkuat karakter dan kompetensi mereka sesuai karakter bangsa. Pelaksanaan kegiatan seperti budi daya ikan lele, pembuatan tanaman obat, lomba seni, serta kegiatan keagamaan dan rekoleksi memungkinkan peserta didik tidak hanya menguasai 知识 akademik, tetapi juga mengasah kompetensi sosial, gotong royong, disiplin, serta keimanan dan karakter Pancasila. Kegiatan tersebut menanamkan nilai-nilai budaya, religius, dan kebersamaan yang penting dalam pembentukan peserta didik yang berkarakter dan berintegritas.

Dengan adanya fleksibilitas dan diferensiasi dalam pembelajaran yang diusung oleh KMB, peserta didik dapat belajar sesuai dengan gaya dan kecepatan mereka masing-masing. Mereka diberikan ruang untuk berperan aktif dalam proses belajar melalui proyek, presentasi, dan berbagai inovasi lain. Hal ini berpengaruh positif terhadap penguasaan kompetensi akademik, seperti kemampuan berpikir kritis, problem solving, serta komunikasi yang efektif. Misalnya, kegiatan membuat miniatur gereja atau tarian daerah menunjukkan pengembangan kompetensi seni dan budaya sekaligus keimanan. Meskipun banyak manfaat yang telah terlihat, tantangan seperti ketidakmerataan pemahaman dan kompetensi guru, terbatasnya waktu, serta keberagaman latar belakang siswa, menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas hasil belajar dan penguasaan kompetensi peserta didik. Untuk itu, pengawas sebagai pendamping dan pembimbing harus terus memantau dan

mendukung penguatan kompetensi peserta didik melalui supervisi, pelatihan guru, serta pengembangan perangkat pembelajaran yang relevan dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. Implementasi KMB diharapkan mampu meningkatkan kualitas kompetensi peserta didik secara menyeluruh sesuai visi pendidikan nasional, yaitu menyiapkan mereka menjadi pelajar Pancasila yang berkualitas, berkarakter, dan mampu bersaing di era global. Pengawas dan pendamping satuan pendidikan berperan penting dalam mendorong dan memastikan implementasi kurikulum yang berorientasi pada penguatan kompetensi peserta didik. Melalui kegiatan pelatihan, supervisi, dan pengimbasan, mereka membantu guru dalam menyusun perangkat pembelajaran yang meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar agar peserta didik tidak hanya menguasai kompetensi dasar, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan selama hidupnya demi kemajuan bangsa.

D. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi

Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar (KMB) dan program Sekolah Penggerak (SP) di berbagai jenjang pendidikan di Kota Pontianak menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan kesiapan guru dalam menginternalisasi metode baru, seperti pembelajaran mendalam (deep learning), serta penyesuaian perangkat pembelajaran yang masih mengikuti terminologi lama (misalnya RPP, silabus) dan belum sepenuhnya diadaptasi sesuai konsep KMB. Selain itu, banyak guru yang mengambil modul secara copy-paste tanpa mampu menyesuaikan materi dengan kondisi dan karakteristik peserta didik dari latar belakang berbeda, misalnya anak daerah vs anak kota, sehingga proses pembelajaran seringkali tidak optimal. Keterbatasan waktu dan sumber daya juga menjadi hambatan utama. Guru seringkali kekurangan waktu untuk menyelesaikan seluruh materi, termasuk kegiatan kreatif seperti pembuatan poster, pementasan drama, maupun proyek nyata seperti budidaya ikan lele yang menjadi bagian dari Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Selain itu, kendala logistik dan dana, terutama terkait pengimbasan dan pelatihan, sering kali menjadi penghalang, karena tidak semua sekolah mendapatkan dana yang memadai dan harus mengeluarkan dana sendiri.

Perbedaan kesiapan teknologi dan kompetensi peserta didik dan pendidik juga menjadi hambatan. Banyak guru senior yang gagap teknologi, berbekal metode konvensional, dan belum mampu menjalankan program-program digital maupun daring secara optimal. Penggunaan platform digital seperti Portal Merdeka Mengajar (PMM) maupun ruang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) masih terbatas, terutama bagi guru-guru yang tidak memiliki akses atau kompetensi teknologi yang memadai. Selain itu, hambatan lain muncul dari persepsi bahwa sekolah yang menerima program SP dan GP dianggap memperoleh privilege tertentu, sehingga timbul rasa cemburu dan kompetisi tidak sehat antar sekolah. Ketidakmerataan dalam pelaksanaan juga terlihat dari proses seleksi, di mana sekolah yang memiliki sumber daya lebih baik dan guru bersertifikasi lebih banyak dipandang lebih layak, sementara sekolah lain, termasuk sekolah swasta dan guru honorer, sulit mengikuti atau berpartisipasi secara penuh.

Lebih jauh lagi, hasil evaluasi dan supervisi mengungkapkan bahwa masih banyak guru yang belum mampu menerapkan pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka secara efektif. Pengawasan melalui observasi dan supervisi pembelajaran belum optimal, dan pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan seringkali terbatas waktu serta sifatnya umum, sehingga belum mampu menjawab kebutuhan khusus di lapangan. Akhirnya, ketidakjelasan arah kebijakan dan perubahan regulasi setelah pergantian pejabat di tingkat pusat dan daerah menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan di lapangan. Sejumlah sekolah dihadapkan pada kenyataan bahwa program yang sudah diterapkan, seperti KM, mengalami penundaan atau bahkan dihentikan, sementara program baru belum jelas definisinya, sehingga mempengaruhi konsistensi dan keberlanjutan implementasi di tingkat sekolah.

E. Upaya dan Solusi yang Diterapkan oleh Sekolah

Meski secara resmi SP dan GP sebagai bagian dari Kurikulum Merdeka (KM) telah dihentikan, namun isi dan konsep dasar KM masih diberlakukan, dan KM juga masih berlaku. Hanya ada tambahan dan penekanan yang baru, yaitu dilakukan pengembangan lebih lanjut dengan pembelajaran mendalam (*deep learning*) yang disosialisasikan ke berbagai sekolah dengan diterapkan secara bertahap di sekolah-

sekolah seperti SMKN 8 dan SDS GB1 dan berbagai sekolah lainnya; bukan hanya eks SP. Sekolah berusaha menyesuaikan perangkat pembelajaran, seperti modul ajar dan proses evaluasi, agar sesuai dengan kurikulum yang sedang berjalan, serta melakukan pelatihan internal dan eksternal untuk meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah terkait KMB dan deep learning.

Pemerintah melalui bantuan dana dan pelatihan, misalnya dari BPMP dan dana BOS kinerja turut mengupayakan peningkatan kualitas pembelajaran dan pelatihan guru. Sekolah menginisiasi pelatihan *In House Training* (IHT), loka karya, serta penggunaan platform daring seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan Ruang GTK untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman guru terhadap penerapan kurikulum dan metodologi baru. Guru-guru diupayakan mengikuti pelatihan, workshop, dan seminar secara rutin, baik secara daring maupun luring, untuk mengasah kemampuan pedagogik dan keahlian terkait implementasi kurikulum baru, termasuk pelatihan tentang pembuatan modul ajar, penilaian, serta penerapan metode pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran mendalam. Kepala sekolah dan pengawas dilibatkan dalam supervisi dan pelatihan untuk memastikan implementasi kurikulum berjalan secara optimal dan sesuai pedoman. Sekolah berupaya menghasilkan guru yang kompeten, kreatif, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan efektif.

Kepala sekolah dan guru di sekolah penggerak menjalankan program pengimbasan ke sekolah lain; ini dilakukan minimal tiga kali dalam satu tahun dengan dokumentasi kegiatan yang lengkap sebagai bagian dari proses berbagi pengalaman dan memperkuat jaringan. Sekolah juga mengadakan komunitas belajar (Kombel) secara rutin setiap Jumat untuk saling berbagi pengalaman, studi kasus, serta solusi terkait tantangan dalam penerapan kurikulum. Melalui kolaborasi ini, mereka berupaya mengatasi tantangan penerapan kurikulum yang berbeda-beda dan mempercepat adaptasi dari seluruh pihak pendidikan di daerah. Sekolah menyediakan sumber daya teknologi seperti buku digital, media pembelajaran berbasis teknologi, dan perangkat praktik serta komputer untuk mendukung pembelajaran yang berbasis kurikulum baru. Pelatihan menggunakan platform daring, aplikasi, dan media digital dilakukan secara intensif agar guru mampu

memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam proses pembelajaran serta evaluasi.

Sekolah berupaya menyesuaikan perangkat pembelajaran seperti modul ajar, ATP (Alur Tujuan Pembelajaran), dan perangkat penilaian agar sesuai dengan kebutuhan siswa dan karakteristik lingkungan lokal. Penyusunan modul ajar dilakukan secara kolaboratif dan melibatkan tenaga ahli serta narasumber dari dinas terkait maupun lembaga lain guna memastikan relevansi dan kualitasnya. Sekolah juga melakukan revisi terhadap perangkat pembelajaran secara periodik untuk menyesuaikan perubahan kebijakan dan kebutuhan peserta didik. Sekolah mengatasi kendala berupa keterbatasan waktu, sumber daya, dan pemahaman guru dengan mengatur jadwal kegiatan yang tepat, memperkuat kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, dan mengadakan evaluasi serta supervisi secara rutin. Sekolah juga memperkuat kolaborasi antara guru, kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul selama proses implementasi kurikulum dan inovasi pembelajaran. Dalam menghadapi kendala kesiapan peserta didik dan guru, sekolah merancang program remedial dan pengayaan agar keberhasilan pembelajaran tetap terjaga.

Menurut P, seorang Pendamping Satuan Pendidikan (pengawas guru) PAK jenjang SD (diperbantukan karena pendamping tingkat SD telah pensiun) hingga SMA/SMK, menyoroti fenomena “ganti menteri, ganti kurikulum” yang sepertinya ada benarnya. Ia menyatakan bahwa setiap pergantian kurikulum cenderung berorientasi “proyek” dan akan memicu kompetisi tidak sehat di antara sekolah. Berkaitan keberadaan Sekolah Penggerak (SP) dan Guru Penggerak (GP), P berpendapat bahwa keduanya dapat menimbulkan kecemburuan di sekolah-sekolah non-SP. Status GP diibaratkan sebagai SIM (Surat Izin Mengemudi), sebagai batu loncatan untuk promosi jabatan seperti Kepala Sekolah dan Pengawas. Meskipun berusia muda dan minim pengalaman, mereka dapat dipromosikan, namun penguasaan ilmu pengetahuan saja tidak cukup karena menjadi Kepsek atau Pengawas menuntut pengalaman dan keahlian lain.

Untuk menjadi GP, guru harus berusia di bawah 50 tahun, meskipun berkompeten, dan mayoritas guru senior seperti mereka yang kelahiran 1968

mengalami gagap teknologi, masih menggunakan cara konvensional dan tulisan tangan. Ada persepsi bahwa SP dan gelar GP memberi privilese tertentu, apalagi jika status kepegawaiannya di bawah naungan Kemenag. Pengawas sekolah yang berstatus di bawah naungan Kemenag, misalnya, tidak memiliki akses ke Dinas Pendidikan (Diknas) untuk menjadi GP. Meskipun SP telah dihentikan, Kurikulum Merdeka Belajar tetap berlanjut, dan bantuan untuk SP sudah dihentikan, termasuk dana pelatihan. Ada wacana kembali mengaktifkan KKG dan MGMP, serta adanya bantuan dana yang pernah diterima SMK St. Maria sebesar 1,3 M untuk proyek SP dan GP.

Para calon GP harus melalui proses seleksi dan pelatihan ketat, termasuk tes dan pelatihan yang dilaksanakan di sekolah, dengan pendampingan dari guru dan instruktur dari berbagai daerah. Pendampingan dilakukan secara daring, dan mereka bertugas mendampingi calon GP di sekolah terkait setiap bulan guna mengevaluasi kemajuan mereka. Meskipun SP dan GP tidak lagi aktif, kurikulum tetap dijalankan secara bertahap dan adaptif; seperti pelatihan dan pendampingan tetap dilakukan meskipun secara tidak resmi melalui berbagai kegiatan seperti loka karya dan supervisi. Tantangannya antara lain adalah penerapan materi yang belum merata, kurang optimalnya paket pelatihan, serta kendala waktu dan sumber daya. Pelatihan dan modul ajar disusun secara umum untuk semua guru mapel, dan bantuan dana melalui anggaran pusat digunakan untuk peralatan praktik dan kegiatan nonfisik seperti pelatihan. Sekolah juga berupaya menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar dan pembelajaran mendalam (*deep learning*), meskipun pada faktanya masih banyak kendala di lapangan. Pelaksanaan kurikulum dan pelatihan diintegrasikan ke dalam kegiatan sekolah, termasuk supervisi, MGMP, dan komunitas belajar guru. Sekolah berusaha menyesuaikan diri dengan regulasi pemerintah dan cukup aktif dalam mengikuti pelatihan serta kegiatan pendukung lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sekolah-sekolah di Pontianak secara aktif mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan pendekatan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada penguatan karakter serta kompetensi peserta didik. Implementasi difokuskan pada pembelajaran yang lebih fleksibel, berbasis proyek, dan mendalam, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan terkait waktu, sumber daya, dan kesiapan guru. Pemerintah dan berbagai lembaga turut mendukung melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi sumber belajar secara daring dan luring. Kesimpulan dari pertanyaan mengenai peluang dan tantangan guru PAK untuk menjadi Guru Penggerak di sekolah yang berpredikat Sekolah Penggerak adalah sebagai berikut:

Peluang:

1. Guru PAK memiliki kompetensi dan pengalaman pendidikan yang mendukung untuk berkembang menjadi Guru Penggerak, apalagi dengan adanya pelatihan, pendampingan, dan pelatihan daring yang terus berlangsung;
2. Sekolah yang berpredikat Sekolah Penggerak memberikan peluang bagi Guru PAK untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh pengalaman, serta memperluas jejaring melalui kegiatan pengimbasan, pelatihan, dan kolaborasi antar sekolah;
3. Program Kurikulum Merdeka Belajar dan P5 membuka ruang bagi guru untuk mengembangkan inovasi pembelajaran, meningkatkan kreativitas siswa, dan menginternalisasi karakter serta profil pelajar Pancasila;
4. Guru PAK berkesempatan untuk berperan dalam pengembangan kurikulum, pembuatan modul ajar, dan pelaksanaan proyek berbasis karakter dan kompetensi, yang semuanya meningkatkan kualitas diri dan daya saing;

Tantangan:

1. Keterbatasan pengalaman dan penguasaan teknologi di kalangan guru senior, termasuk guru PAK yang kurang familiar dengan IT, menjadi hambatan untuk mengikuti pelatihan digital dan pelaksanaan pembelajaran inovatif;
2. Proses seleksi dan persyaratan menjadi Guru Penggerak cukup ketat, termasuk batas usia dan status kepegawaian, yang menyulitkan guru honorer atau yang belum memenuhi syarat formal;
3. Kurangnya kesiapan fasilitas dan waktu, serta beban kerja yang tinggi, menghambat pelaksanaan kegiatan pelatihan, supervisi, dan pengimbasan secara optimal;
4. Perubahan kebijakan, termasuk penghentian dana dan program tertentu, menyebabkan terjadinya ketidakjelasan arah dan konsistensi pengembangan guru dan sekolah;
5. Adanya isu kecemburuan dan kompetisi tidak sehat antar sekolah, serta perlunya penanganan agar program tidak memunculkan kecemburuan sosial di lingkungan pendidikan.

Secara umum, peluang besar tersedia bagi guru PAK yang bersemangat dan mampu beradaptasi, namun tantangan berupa keterbatasan kemampuan digital, kesiapan SDM, regulasi, dan sumber daya perlu diatasi agar guru PAK dapat optimal berperan sebagai Guru Penggerak dalam mendukung transformasi sekolah menuju keberhasilan pelaksanaan kurikulum dan karakter peserta didik.

B. Saran dan Rekomendasi

Saran:

1. Perlunya Penataan Sistem Politik dan Regulasi Pendidikan Mengingat sering terjadinya pergantian kebijakan dan kurikulum, disarankan agar kementerian dan dinas pendidikan menetapkan pedoman yang lebih stabil dan konsisten. Ini termasuk melakukan kajian dampak sosial dan akademik sebelum perubahan kurikulum dan memperkuat adaptasi metodologi yang fleksibel;
2. Penguatan Kompetensi Guru Senior dan Teknologi sebagian guru yang berusia di atas 50 tahun dan minim kemampuan IT perlu diberikan pelatihan khusus agar tidak tertinggal dalam penguasaan teknologi dan

metode pembelajaran digital. Program mentoring dari guru muda yang sudah mahir teknologi dapat menjadi solusi efektif;

3. Perhatian pada Keseimbangan Prinsip Privilese dan Equitas
Usulan agar semua sekolah dan guru mendapatkan akses yang adil terhadap pelatihan dan fasilitas. Sekolah berlabel SP harus diimbangi dengan program pengembangan kompetensi untuk sekolah lain yang belum mendapatkan label tersebut;
4. Pengembangan Program Pendampingan dan Supervisi Berkelanjutan
Perlu ada program supervisi berkala dan evaluasi pelaksanaan kurikulum baru secara sistematis dan terencana, dengan melibatkan pengawas dari pusat dan daerah secara kolaboratif, untuk memastikan implementasi yang sesuai visi dan misi pendidikan;
5. Penguatan Kegiatan Diseminasi dan Kolaborasi Sekolah
Meningkatkan kegiatan pengimbasan dan berbagi pengalaman antara sekolah melalui program berbasis komunitas belajar dan kegiatan kolaboratif, agar pengalaman positif dapat didiseminasikan secara lebih luas, mengurangi kecemburuan dan meningkatkan solidaritas antar sekolah;
6. Fokus Pengembangan Profesional Berbasis Kompetensi dan Pengalaman.
Prioritaskan pelatihan yang menitikberatkan pada pengalaman praktis dan penguasaan kompetensi manajerial dan pedagogis, bukan hanya pelatihan berbasis teori. Ini akan membantu guru dan kepala sekolah lebih siap menghadapi tantangan nyata di lapangan.

Rekomendasi:

1. Penguatan Sistem Kurikulum dan Penilaian.
Membuat modul dan panduan pelaksanaan kurikulum yang jelas dan konsisten, termasuk standar penilaian yang fleksibel namun objektif agar perbedaan interpretasi tidak mengganggu proses pembelajaran;
2. Peningkatan Infrastruktur Digital dan Akses Teknologi.
Perluasan akses internet dan fasilitas teknologi di semua sekolah, terutama untuk guru senior dan di daerah terpencil, sehingga mereka dapat mengikuti pelatihan daring dan pengembangan kompetensi lain secara optimal.

3. Kebijakan Pembinaan Sosial dan Psikologis Guru dan Kepala Sekolah
Memberikan pendampingan dan pelatihan soft skill seperti manajemen stres, komunikasi efektif, dan kepemimpinan untuk mendukung keberhasilan transformasi pendidikan;
4. Pengembangan Ekosistem Pembelajaran yang Inklusif
Menyusun program khusus untuk mendukung guru dan siswa berkebutuhan khusus, serta memperkuat kolaborasi dengan lembaga sosial dan kesehatan terkait;
5. Evaluasi dan Pengembangan Berkelanjutan Kurikulum dan Metode Pembelajaran
Melakukan evaluasi secara periodik dan melibatkan semua pemangku kepentingan (guru, kepala sekolah, siswa, orang tua) dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Penutup:

Dengan menindaklanjuti saran dan rekomendasi di atas secara serius dan berkelanjutan, diharapkan proses pendidikan di Kota Pontianak dapat menjadi lebih adil, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan zaman serta mampu meningkatkan capaian kompetensi dan karakter peserta didik secara optimal.

Daftar Pustaka

- Alsubaie, M. A. (2016). Teacher Involvement in Curriculum Development. *Journal of Education and Practice*, 9(7).
- Creswell, J. W., & Vicki L. Plano Clark. (2006). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Sage Publications.
- Koesoema, D. A. (2020). Merdeka Belajar. *Kompas*.
- Kurniasih, I. (2023a). *A-Z Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)* (Amazing Group Creative (ed.)). Kata Pena.
- Kurniasih, I. (2023b). *Evaluasi Kurikulum Merdeka: Memahami dan Meningkatkan Efektivitas Pendidikan Abad 21* (P. Yuliana (ed.)). Kata Pena.
- Mulyasa. (2014). Pengembangan dan Implementasi kurikulum 2013. *Bandung: Remaja Rosadakarya*.
- Mulyasa, H. (2021). *Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar*. Bumi Aksara.
- Rahayu, R., Rosita, R., Rahayuningsih, Y. S., Hernawan, A. H., & Prihantini. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. *Basicedu*, 6(4), 6313–6319. <https://jbasic.org/index.php/basicedu>
- Sherley, D. E., & Sihombing, H. . (2020). Merdeka Belajar: Kajian Literatur. In *Urban Green Conference Proceeding Library*.
- Widyastuti, A. (2022). *Menjadi Sekolah dan Guru Penggerak* (R. A. P. Putri (ed.)). PT Elex Media Komputindo.
- Yusuf, M., & Afriansyah, W. (2021). Konsep Merdeka Belajar dalam Pandangan Filsafat Konstruktivisme. *Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 2(7).

Lampiran

Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK

1. Apakah sekolah tempat Bapak/Ibu mengajar sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak? Sejak kapan?
2. Apakah Bapak/Ibu menjadi Guru Penggerak? Apa saja syarat yang harus dipenuhi sebagai Guru Penggerak?
3. Sebagai Guru Penggerak, apa saja tuntutan yang harus dipenuhi dibanding dengan bukan Guru Penggerak?
4. Apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik?
5. Apa saja kelebihan KMB jika dibandingkan dengan K-13? Apa yang khas dan baru dari KMB?
6. Apa saja bentuk-bentuk kegiatan dan langkah-langkah yang harus Bapak/Ibu lalui sebagai bentuk persiapan penerapan KMB? Menurut Bapak/Ibu apakah persiapan-persiapan itu cukup memadai untuk menerapkan KMB?
7. Apa saja bentuk dukungan sekolah dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan KMB khususnya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik?
8. Apa saja kendala yang Bapak/Ibu jumpai terkait implementasi KMB ini? Jelaskan bentuk dan jenis kendalanya!
9. Apa saja yang sekolah lakukan/upayakan untuk membantu guru-guru memahami dan menerapkan KMB?
10. Selain melalui pertemuan pembinaan, sosialisasi dan seminar-seminar dalam rangka memahami, menyusun perangkat-perangkat mengajar sebagai bagian dari persiapan penerapan KMB, adakah upaya lain yang Bapak/Ibu tempuh? Mengapa menempuh upaya tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH

1. Apakah sekolah yang Bapak/Ibu pimpin sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak? Sejak kapan?
2. Apa saja persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi sekolah penggerak?
3. Apa saja persyaratan yang sudah dipenuhi pihak sekolah dan yang belum mampu dipenuhi oleh pihak sekolah?
4. Sebagai Sekolah Penggerak, apa saja tugas dan tanggung jawab yang harus diemban?
5. Apakah saja kebijakan dan langkah yang Bapak/Ibu tempuh guna menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Sekolah Penggerak?
6. Dalam rangka pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar (KMB), menurut Bapak/Ibu apakah seluruh komponen sekolah sudah siap dan mampu memikul tanggungjawabnya masing-masing sehingga penerapan kurikulum ini dapat berhasil?
7. Apakah semua guru yang ada di sekolah ini sudah menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar, termasuk guru Pendidikan Agama Katolik?
8. Apa saja kendala yang dijumpai para guru terkait implementasi KMB ini?
9. Apa saja yang sekolah lakukan/upayakan sebagai langkah persiapan dan pelaksanaan KMB?
10. Apakah pihak Dinas Pendidikan (birokrasi) cukup membantu sekolah dalam mewujudkan Merdeka Belajar?

Foto-foto Lapangan



Wawancara dengan Kepsek SDS Katolik Gembala Baik 1



Wawancara dengan Guru PAK SMPN 10



Kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*; Diskusi Kelompok Terfokus)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



PERSONAL

1. Nama : Gustaf Hariyanto
2. Tempat/tanggal lahir : Menjalin, 25 Oktober 1973
3. NIP : 197310252023211002
4. Pangkat/Gol. : Penata I/IIIb
5. Jafung : Asisten Ahli/X
6. Unit Organisasi : Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
7. Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Komp. Batara Indah I Blok P.14 Sungai Jawi Pontianak Kota
8. HP : 081352030087
9. Email : gustafhariyanto@stakatnpontianak.ac.id

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun	Jenjang / Program Studi / Institusi
2013	S2 Sosiologi Universitas Tanjungpura Pontianak
2007	S1 Teknik Sipil Universitas Mpu Tantular Jakarta
2008	S1 Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian
2014	Pengaruh Gereja Katolik terhadap Sistem Kepercayaan Dayak Orung Da'an Desa Nanga Raun Dusun Tilung Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu
2015	1. Identifikasi Sub-sub Suku Dayak di Kabupaten Landak dan Bengkayang

2. Interaksi Masyarakat di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat: Tinjauan terhadap Kawasan Perbatasan Jagoi Babang
3. Strategi Kelangsungan Hidup Masyarakat Perbatasan: Studi Kawasan Perbatasan Desa Entikong
1. Model Pengelolaan Sumber Daya Perikanan melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal di Kalimantan Barat (Studi Kasus di Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas
2. Konsep Keselamatan dalam Masyarakat Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat
1. Potensi Seni dan Warisan Budaya dalam Pengembangan Industri Kreatif di Kabupaten Bengkayang
2. Kajian atas Ajaran Moral dalam Pendidikan Agama Katolik (PAK) pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kota Pontianak Kalimantan Barat
3. Budi Daya Tanaman dengan Hidroponik
- Model Pengajaran dan Pembelajaran dalam Pendidikan Agama Katolik (PAK) pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Pontianak
- Implementasi Kedwibahasaan dalam Pengajaran Pendidikan Agama Katolik (PAK) pada Sekolah Bilingual di Kota Pontianak

RIWAYAT PUBLIKASI

Tahun	Judul Publikasi Penelitian (Jurnal Nasional/Internasional)
2013	Pembangunan Ekonomi dan Kebudayaan (di jurnal kampus <i>Omnes Et Omnia</i>)
2015	Seputar Penelitian Tindakan (<i>Action Research</i>)
2016	Teknologi dalam Tinjauan Filosofis Jaques Ellul (di jurnal kampus <i>Omnes Et Omnia</i>)
2018	Petani Indonesia: Antara Berkah dan Bencana (di jurnal <i>In Veritate Lux</i>)
2019	POTENSI ANYAMAN BIDAI SEBAGAI PRODUK UNGGULAN KABUPATEN BENGKAYANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL (Jurnal Borneo Akcaya)
2021	Pengidentifikasian Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Menghindari Intoleransi di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Sinta 4)
2022	1. Pemahaman Guru Pendidikan Agama Katolik (PAK) terhadap Ajaran Moral pada Jenjang SMA di Pontianak (Sinta 4) 2. Sistem dan Dunia-Kehidupan menurut Jürgen Habermas
2023	Model Pembelajaran dalam Pendidikan Agama Katolik (PAK) pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Pontianak (Sinta 4)
2024	1. Sekilas tentang Dayak [Pangin] Orung Da'an di Desa Nanga Raun Kabupaten Kapuas Hulu (Borneo Review) 2. The Asian-African Conference Amidst Multipolar World (Book Chapter)

3. PELATIHAN RAGAM MODEL PEMBELAJARAN BAGI GURU PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA PONTIANAK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



PERSONAL

- 10 Nama : Lukas Ahen
- 11 Tempat/tanggal lahir : Sanggau, 17 Mei 1966
- 12 NIP (jika ada) : 196605172000031002
- 13 Pangkat/Gol. : Penata Tk I/III d
- 14 Jafung : Lektor
- 15 Unit Organisasi : STAKat Negeri Pontianak
- 16 Alamat : Jl. Perdamaian, Kompleks Damai Sejahtera D8 Kota baru Ujung Pontianak
- 17 HP : 085220913337
- 18 Email : lukasahen@stakatnpontianak.ac.id

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun	Jenjang / Program Studi / Institusi
2011	S2 Manajemen Pendidikan, Universitas Islam Nusantara Bandung

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian
2024	Analisis “The Ecclesiastical Drifts” pada Mahasiswa Katolik dari Perspektif Ajaran Sosial Gereja pada Perguruan Tinggi di Kabupaten Sintang
2023	Pendidikan Keagamaan Katolik di Perbatasan Malaysia: Psychologies, Opportunities & Challenges
2022	“Anxieties & Catechism Literacies”: Studi Kasus Pada Mahasiswa Calon Guru Pendidikan Agama Katolik Di Stakat Negeri Pontianak

RIWAYAT PUBLIKASI

Tahun	Judul Publikasi Penelitian (Jurnal Nasional/Internasional)
-------	--

- 2020 Studi Analisis Kemampuan Pengelolaan Kecerdasan Interpersonal dengan Prestasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kalimantan Barat, (SINTA 5)
- 2021 Analyzing the Use of Catholic Learning Model for the State Primary Schools in South and Southeast Pontianak (SINTA 2)
- 2021 The Roles of Parents for Children's Faith Education: A Catechization Review (SINTA 2)
- 2024 Penggunaan Simbol Keagamaan Katolik Dalam Ritual Ilmu Kebal: Praktik Sinkritisme (Studi Kasus Literasi Keagamaan di Kalimantan Barat) (Prosiding Siminar Nasional Moderasi Beragama)
- 2025 Anxiety and Religious Literacy: An Intercorrelation Analysis in the Context of Post-Teaching Practice Catechesis (SINTA 2)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



PERSONAL

- 19 Nama : Semi
- 20 Tempat/tanggal lahir : Lingga, 12 Oktober 2004
- 21 NIP (jika ada) :
- 22 Pangkat/Gol. :
- 23 Jafung :
- 24 Unit Organisasi :
- 25 Alamat : Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Sungai Ambawang, Desa Lingga, Dusun Lingga Timur, RT. 08/RW. 14
- 26 HP : 082253326532
- 27 Email : semitarigas@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun	Jenjang / Program Studi / Institusi
.....	

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian
.....	

RIWAYAT PUBLIKASI

Tahun	Judul Publikasi Penelitian (Jurnal Nasional/Internasional)
.....	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENELITIAN DOSEN TAHUN 2025

Implementasi Kurikulum Merdeka dalam PAK di Sekolah Penggerak pada Jenjang SD, SMP, dan SMA/K di Kota Pontianak



Oleh:

Gustaf Hariyanto, M.Si.
Lukas Ahen, S.Ag., M.M.Pd.
Semi

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI
PONTIANAK
OKTOBER 2025